DOKUMEN PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2024-2026

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA PANGKALPINANG

KATA PENGANTAR

Puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas berkat Rahmat dan Karunia-Nya Dokumen Rencana Strategis Perubahan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pangkalpinang Tahun 2024 – 2026 dapat diselesaikan. Selanjutnya pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih kepada semua pihak atas perhatian, bantuan, maupun partisipasinyanya dalam penyelesaian Dokumen Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pangkalpinang tahun 2024 - 2026 ini.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan sebagai salah satu pelaku pembangunan, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pangkalpinang telah menyusun Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Tahun 2024 – 2026. Dokumen Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pangkalpinang, merupakan dokumen perencanaaan yang bersifat indikatif dan memuat berbagai program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Bererencana Kota Pangkalpinang dalam kurun waktu tahun 2024 – 2026.

Melalui kesempatan ini saya mengajak kepada semua pegawai, untuk saling bahu-membahu dalam menyelenggarakan pembangunan di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pangkalpinang. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahNya serta memberikan petunjuk dan kekuatan kepada kita untuk melaksanakan pembangunan di Kota Pangkalpinang.

Pangkalpinang, 30 Agustus 2024

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
KOTA PANGKALPINANG

Drs. AGUSTU AFENDI, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA, IV/c
NIP. 19670809 199403 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI..... ii

BAB I : PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang..... 1

1.2 Landasan Hukum..... 3

1.3 Maksud dan Tujuan..... 7

1.4 Sistematika Penulisan..... 8

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah..... 12

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah..... 20

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah..... 27

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah..... 31

3.2 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi..... 32

3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis..... 34

3.4 Penentuan Isu – Isu Strategis..... 49

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah..... 50

4.2 Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah..... 50

BAB V : STRATEGI DAN KEBIJAKAN

5.1 Strategi..... 62

5.2 Arah Kebijakan..... 62

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN..... 66

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN…….. 72

BAB VIII : PENUTUP

8.1 Pedoman Transisi..... 76

8.2 Kaidah Pelaksanaan..... 76

LAMPIRAN

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan adalah proses yang kontinyu, terdiri dari keputusan atau pilihan dari berbagai cara untuk menggunakan sumber daya yang ada, dengan sasaran untuk mencapai tujuan tertentu di masa mendatang. Pembangunan adalah Suatu upaya untuk melakukan perubahan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat (proses perubahan ke arah yang lebih baik). Perencanaan Pembangunan adalah cara atau teknik untuk mencapai tujuan yang diinginkan dalam proses pembangunan sehingga mampu mewujudkan masyarakat yang maju, makmur dan sejahtera. Menurut Jenseen (1995) merekomendasikan perencanaan pembangunan sebagai hal-hal yang harus bersifat kompleks, sehingga prosesnya tetap memperhitungkan kemampuan sumber daya yang ada, baik sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya fisik, dan sumber daya lainnya.

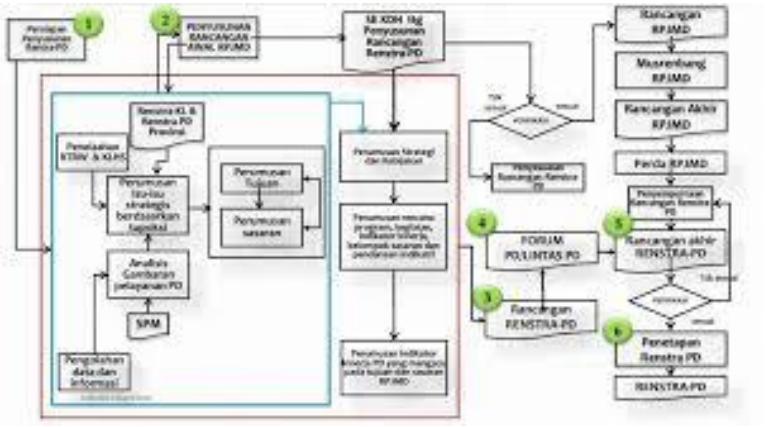
Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan untuk merumuskan strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, perencanaan pembangunan tersebut dirumuskan dalam perencanaan yang bersifat jangka panjang 20 (dua puluh) tahun, menengah 5 (lima) tahun dan pendek 1 (satu) tahun. Di tingkat Kota, ketiga bentuk perencanaan tersebut menghasilkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Sedangkan di tingkat Perangkat Daerah (PD) terdapat dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) untuk jangka waktu lima tahun dan Rencana Kerja (Renja) untuk periode satu tahun.

RENSTRA Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, dan program, serta kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan wajin dan/Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau RPJMD dan bersifat indikatif. Tahun 2023 merupakan tahun terakhir dalam periode RPJMD Kota Pangkalpinang tahun 2018-2023, hal ini berkaitan dengan berakhirnya masa jabatan Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang periode 2018-2023.

Penyusunan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Renstra 2024-2026 sebelumnya berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) dan Keputusan Menteri dalam Negeri nomor 050.5889 Tahun 2021 tentang HasiL Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Akan tetapi seiring perjalanan waktu terbitlah Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Berdasarkan latar belakang di atas, dan dengan terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 maka dilakukan Perubahan Renstra Tahun 2024-2026 untuk dilakukan penyesuaian nama Sub-Sub Kegiatan beserta indikatornya yang ada di dalam Renstra Tahun 2024-2026 Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pangkalpinang khususnya pada Tabel 6.1 dan tabel-tabel lain yang terkait.

Gambar 1.1 Hubungan Dokumen Renstra SKPD dengan Dokumen lainnya



1.2. Landasan Hukum

Adapun landasan hukum dalam penyusunan RENSTRA Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026 sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia) Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk kotapraja dalam lingkungan daerah tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217,Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2OO8 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
14. Keputusan Menteri dalam Negeri nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri dalam Negeri nomor 050.5889 Tahun 2021 tentang HasiL Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
15. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pangkalpinang Tahun 2011-2030 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2012 Nomor 01);
16. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 Nomor 11 Seri E);
17. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18);

18. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pangkalpinang Tahun 2011-2030 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 54);
19. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2020 Nomor 01);
20. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2024 – 2026 (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2023 Nomor 144);
21. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis (Berita Acara Daerah Tahun 2023 Nomor 148);
22. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 47 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Susunan Organisasi Unsur Pelaksana Teknis Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2023 Nomor 182).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan RENSTRA Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026 adalah untuk menggambarkan arah dan pedoman pelaksanaan program, kegiatan dan Sub kegiatan serta kondisi yang ingin dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pangkalpinang selama kurun waktu tiga tahun ke depan dalam rangka mendukung pencapaian RPD Kota Pangkalpinang yang tertuang dalam dokumen RPD Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026. Adapun tujuan penyusunan RENSTRA Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pangkalpinang adalah :

1. Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, serta program, kegiatan dan Sub kegiatan pembangunan untuk jangka waktu tiga tahun ke depan sesuai tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pangkalpinang;
2. Merumuskan indikator dan target kinerja yang jelas dan terukur;
3. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pangkalpinang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya terkait perumusan kebijakan pembangunan daerah, monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan;
4. Menjadi kerangka dasar dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pangkalpinang guna menunjang pencapaian target kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pangkalpinang terutama pada penyusunan RENJA yang bersifat tahunan:
5. Meningkatkan kualitas pelayanan publik.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan RENSTRA Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026, meliputi :

Bab I PENDAHULUAN

Pendahuluan berisikan tentang:

Latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan RENSTRA Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026.

Bab II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA

Gambaran Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pangkalpinang berisikan informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RENSTRA Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Bappeda kabupaten/kota, hasil telaahan terhadap RTRW yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana pada tiga tahun mendatang.

Bab III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pangkalpinang

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pangkalpinang beserta faktor yang mempengaruhinya.

3.2 Telaahan Tujuan dan Sasaran Rencana Pembanguan Daerah (RPD)

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pangkalpinang yang terkait dengan pencapaian tujuan dan sasaran RPD dalam priode tahun 2024-2026. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pangkalpinang, dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana yang dapat mempengaruhi pencapaian sasaran dan tujuan RPD. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pangkalpinang

3.3 Telaahan RENSTRA K/L, RENSTRA DP3ACSKB Provinsi, Renstra Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pangkalpinang yang mempengaruhi permasalahan-pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana ditinjau dari sasaran jangka menengah RENSTRA K/L ataupun RENSTRA Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Catatan Sipil dan Keluarga Berencana, Renstra Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Pada bagian ini mengemukakan faktor apa saja yang menjadi penghambat dan pendorong dalam pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pangkalpinang yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pangkalpinang ditinjau dari implikasi RTRW.

3.5 Penetuan Isu-Isu Strategis

Pada bagian ini mengemukakan apa saja yang menjadi isu strategis yang akan ditangani melalui RENSTRA Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pangkalpinang berdasarkan permasalahan pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pangkalpinang.

Bab IV TUJUAN DAN SASARAN

Pada bagian ini menjelaksan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pangkalpinang.

Bab V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bab ini menjelaskan tentang strategi dan kebijakan jangka menengah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pangkalpinang.

Bab VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bab ini menjelaskan rencana program, kegiatan dan Sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

Bab VIII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Pada bab ini menjelaskan indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pangkalpinang yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pangkalpinang dalam tiga tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Kota Pangkalpinang.

Bab VIII PENUTUP

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pangkalpinang.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pangkalpinang

Sesuai dengan Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 47 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Susunan Organisasi Unsur Pelaksana Teknis Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2023 Nomor 182), Kepaal Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan penyelenggaran urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Urusan Pemberdayaan Masyarakat berdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
b. Penetapan Rencana Strategis dinas untuk mendukung Visi dan Misi Kota Pangkalpinang dan Kebijakan Walikota;
c. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah Kota Pangkalpinang bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
d. Penetapan rencana kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana menurut skala prioritas dan mendistribusikannya kepada bawahan;
e. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
f. Pelaksanaan perencanaan dibidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;

g. Pengkoordinasian dan pelaksanaan dibidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dilingkungan Kota termasuk dukungan dana, sarana, dan prasarana; dan
h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pangkalpinang membawahi :

a. Sekretaris;
b. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
c. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggeraka;
d. Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
f. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan sesuai Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 47 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Susunan Organisasi Unsur Pelaksana Teknis Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang, sebagai berikut :

a. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian pelayanan administratif dan fungsional kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.

Dalam melaksanakan tugasnya sekretariat menyelenggarakan fungsi:

1) pelaksanaan koordinasi kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
2) penyusunan rencana program dan anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;

3) penyelenggaraan urusan ketatausahaan rumah tangga, kepegawaian, hukum dan organisasi serta hubungan masyarakat Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
4) penyelenggaraan urusan keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan dan pengelolaan sarana Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;dan
5) pelaksanaan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pengarusutamaan gender di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga, koordinasi pelaksanaan tugas, perumusan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya, penyiapan perumusan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Pemerintah Kota.

Dalam melaksanakan tugasnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi:

1) Penyusunan bahan perumusan koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan dan pelaksanaan evaluasi pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;

2) Penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksaan kebijakan, pemantauan dan pelaksanaan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
3) Penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan dan pelaksanaan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta tindak pidana perdagangan anak;
4) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;dan
5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Bidang Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di Bidang Pemberdayaan Masyarakat kepada seluruh unit organisasi di Lingkungan Pemerintah Kota.

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

1) Penyusunan dan pelaksaaan rencana program dan kegiatan sesuai bidang dan tugasnya;
2) Perumusan kebijakan daerah dalam penguatan kelembagaan dan partisipasi masyarakat, motivasi dan keswadayaan masyarakat;
3) Perumusan kebijakan daerah tentang fasilitasi pelaksanaan kelembagaan masyarakat, motivasi dan keswadayaan masyarakat;

4) Penyusunan rumusan kebijakan pelaksanaan peningkatan dan pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG);
5) Pengkoordinasian pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi serta supervise pelaksanaan gerakan PKK, pemberdayaan lembaga adatdan budaya;
6) Pelaksanaan kegiatan pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG);
7) Pelaksanaan sosialisasi dan penyuluhan Teknologi Tepat Guna;
8) Pengkoordinasian pelaksanaan pembinaan dan fasilitas pendataan dan pendayagunaan profil kelurahan;
9) Monitoring, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pemberdayaan masyarakat;
10) Pelaksanaan system pengendalian intern pemerintahan;
11) Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan / pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
12) Pelaksanaan moniring, evaluasi, dan pelaporan program kerja di bidang pemberdayaan masyarakat;
13) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.

d. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan

Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis di bidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan di Kota. Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan menyelenggarakan fungsi:

1) Perumusan kebijakan teknis daerah di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

2) Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi, dan penggerakan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
3) Pelaksanaan NSPK di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan bidang pengendalian penduduk dan kelurga berencana;
4) Pelaksanaan pemanduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kuntitas penduduk;
5) Peaksanaan pemetaan perkiraan (parameter) pengendalian penduduk di kota;
6) Pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan di tingkat kabupaten dan kota di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
7) Pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh KB (PKB/PLKB);
8) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
9) Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan di bidang pengendallian penduduk dan keluarga berencana;
10) Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksaan tugasnya.

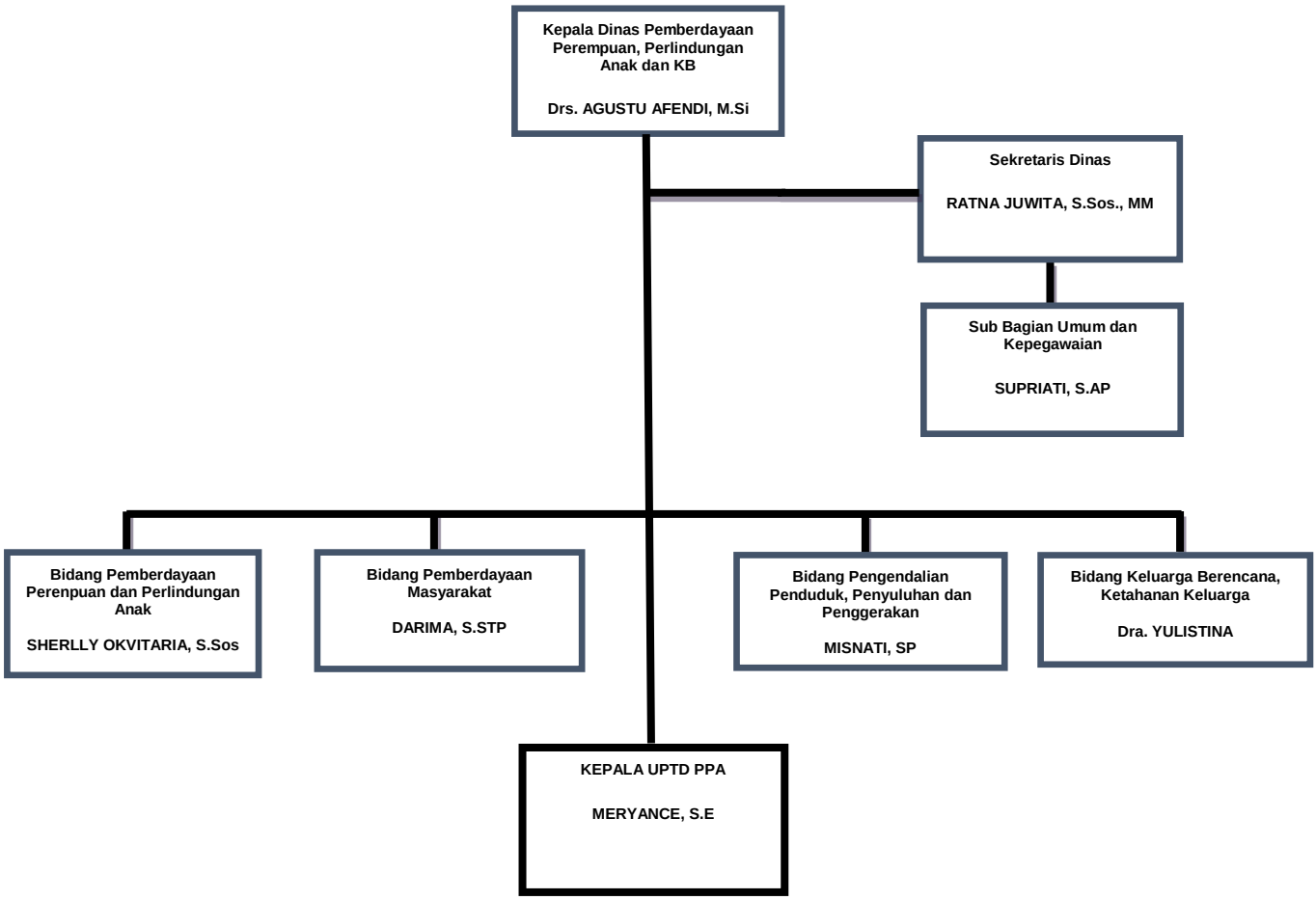
e. Bidang Keluarga Berencana

Bidang Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis di bidang keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga di kota.

Dalam melaksanakan tugasnya Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi:

1) Perumusan kebijakan teknis daerah di bidang keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
2) Pelaksanaan penyelenggaraan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
3) Pelaksanaan penerimaan, penyimpanan pengendalian dan pendistribusian alat obat kontrasepsi di kota;
4) Pelaksaan pelayanan KB di kota;
5) Pelaksaan kebijakan teknis daerah di bidang pembinaan ketahanan remaja;
6) Pelaksaan kebijakan teknis daerah di bidang bina keluarga lansia dan rentan;
7) Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang pemberdayaan keluarga sejahtera melalui usaha mikro keluarga;
8) Pelaksanaan pembinaan kesertaan ber KB di kota;
9) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang keluarga berencana ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
10) Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang kelyarga berencana;
11) Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya.

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana



Sumber : Peraturan Walikota Pangkalpinang No 47 Tahun 2023

2.2 Sumber Daya Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pangkalpinang

Dalam menunjang pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pangkalpinang didukung dengan sumberdaya yang terdiri dari 2 (dua) macam yaitu:

a. Sumber Daya Manusia, berdasarkan tingkat pendidikan, jenis pendidikan yang diikuti baik pendidikan formal maupun non formal merupakan aparatur pemerintah yang meliputi Kepala Badan, Kepala Bidang, Kepala Sub Bidang serta staf yang melaksanakan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.

Pegawai dilingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana sampai Bulan Juni Tahun 2024 sebanyak 60 orang, terdiri dari 29 Orang PNS (3 orang laki-laki dan 26 orang perempuan) dan 31 Orang Non PNS (17 orang laki-laki dan 14 orang perempuan).

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
Juni 2024

No	Golongan	PNS		Non PNS		Jumlah
		L	P	L	P	
1	SD			1		1
2	SMP Sederajat			1	1	2
3	SMA Sederajat	1	1	8	2	12
4	D1					
5	D3		1		5	6
6	S1		21	7	6	34
7	S2	2	3			5
8	S3					
	Jumlah	**3**	**26**	**17**	**14**	**60**

Sumber Data : Subbag.Umum dan Kepegawaian Juni 2024

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
Juni 2024

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	Golongan I			
2	Golongan II			
3	Golongan III	1	21	22
4	Golongan IV	2	5	7
	Jumlah	**3**	**26**	**29**

Sumber Data : Subbag.Umum dan Kepegawaian Juni 2024

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana melaksanakan 3 (tiga) urusan yaitu :

1. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
3. Urusan Pemberdayaan Masyarakat

Kondisi kepegawaian berdasarkan urusan yang dilaksanakan.

1. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Tabel 2.3
Jumlah Pegawai Pada Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak
Juni 2024

No	Golongan	PNS		Non PNS		Jumlah
		L	P	L	P	
1	SMA Sederajat					
2	D1					
3	D3					
4	S1		7		1	8
	Jumlah		**7**		**1**	**8**

Sumber Data : Subbag.Umum dan Kepegawaian Juni 2024

Tabel 2.4
Jumlah Pegawai UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak
Juni 2024

No	Golongan	PNS		Non PNS		Jumlah
		L	P	L	P	
1	SMA Sederajat					
2	D1					
3	D3		1			1
4	S1		1			1
	Jumlah		**2**			**2**

Sumber Data : Subbag.Umum dan Kepegawaian Juni 2024

2. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Tabel 2.5
Jumlah Pegawai Pada Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan
Juni 2024

No	Golongan	PNS		Non PNS		Jumlah
		L	P	L	P	
1	SMA Sederajat			4		4
2	D1					
3	D3			1		1
4	S1		2	2	1	5
5	S2	1	1			2
	Jumlah	**1**	**3**	**7**	**1**	**12**

Sumber Data : Subbag.Umum dan Kepegawaian Juni 2024

Tabel 2.6
Jumlah Pegawai Pada Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga
Juni 2024

No	Golongan	PNS		Non PNS		Jumlah
		L	P	L	P	
1	SD			1		1
2	SMA Sederajat			4		4
3	D1					
4	D3				1	1
5	S1		4	1	1	6
6	S2		1			1
	Jumlah		**5**	**6**	**2**	**13**

Sumber Data : Subbag.Umum dan Kepegawaian Juni 2024

3. Urusan Pemberdayaan Masyarakaat

Tabel 2.7
Jumlah Pegawai Pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Juni 2024

No	Golongan	PNS		Non PNS		Jumlah
		L	P	L	P	
1	SMA Sederajat	1		1		2
2	D1					
3	D3				1	1
4	S1		4	2		
	Jumlah	**1**	**4**	**3**	**1**	**9**

Sumber Data : Subbag.Umum dan Kepegawaian Juni 2024

b. Penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung penyelenggaraan kegiatan perencanaan seperti gedung beserta ruang rapat yang memadai, fasilitas komputer beserta jaringan internet, meja, kursi, mobil dinas Kepala Badan dan mobil operasional, peralatan kantor dan sumber daya pendukung lainnya.

Tabel 2.8
Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi
Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
Juni 2024

No.	Aset Sarana/ Prasarana	Jumlah	Kondisi (Baik/ Rusak)
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1	Baik
2	Micro Bus	1	Baik
3	Mini Bus	5	Baik
4	Sepeda Motor	15	1 Rusak Berat, 10 Kurang Baik, 4 Baik
5	Timbangan Kapasitas 10 Kg	1	Rusak Berat
6	Mesin Ketik Manual Standard	4	Rusak Berat
7	Mesin Fotocopy Folio	1	Rusak Berat
8	Lemari Besi/Metal	4	2 Kurang Baik, 2 Baik
9	Lemari Kayu	3	1 Kurang Baik, 2 Baik
10	Lemari dan Arsip Pejabat Lain-lain	1	Baik
11	Rak Besi	8	1 Baik, 7 Kurang Baik
12	Rak Kayu	15	2 Rusak Berat, 13 Baik
13	Filing Cabinet Besi	14	Baik
14	Lemari Kaca	4	Baik
15	Alat Penyimpanan Kantor Lainnya	1	Baik
16	White Board	1	Baik
17	Papan Nama Instansi	2	Baik
18	Papan Tulis	3	Baik
19	Teralis	7	6 Baik, 1 Rusak Berat
20	Alat Kantor Lainnya	18	Baik
21	Meja Kerja Kayu	51	17 Rusak Berat, 9 Kurang Baik, 25 Baik
22	Kursi Besi/Metal	50	Baik
23	Meja Rapat	14	1 Rusak Berat, 2 Kurang Baik, 11 Baik
24	Meja ½ Biro	42	40 Baik, 2 Rusak Berat
25	Meja Kerja Pejabat Lain-lain	3	Baik
26	Kursi Rapat	201	Baik

27	Kursi Tamu	1	Baik
28	Kursi Biasa	7	Baik
29	Kursi Biasa	6	Baik
30	Bangku Tunggu	3	Baik
31	Sofa	4	Baik
32	Meubeleur Lainnya	2	Baik
33	Mesin Penghisap Debu	1	Kurang Baik
34	Lemari Es	3	2 Baik, 1 Rusak Berat
35	A.C. Window	12	4 Baik, 1 Rusak Berat
36	A.C. Split	20	Baik
37	Kipas Angin	9	Baik
38	Exhause Fan	12	Baik
39	Alat Pendingin Lainnya	3	Baik
40	Kompor Gas (Alat Dapur)	2	Baik
41	Alat Dapur Lainnya	2	1 Baik, 1 Rusak Berat
42	Tangga Alumunium	1	Baik
43	Dispenser	1	Baik
44	Gordyn/Kray	25	23 Baik, 2 Rusak Berat
45	Alat Pemadam/Portable	1	Baik
46	Alat Pembantu Kebakaran	2	Baik
47	Meja Kerja Pejabat Esselon II	1	Baik
48	Meja Kerja Pejabat Esselon III	5	Baik
49	Kursi Kerja Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota	106	20 Rusak Berat, 69 Baik, 17 Kurang Baik
50	Kursi Kerja Pejabat Esselon II	1	Baik
51	Kursi Kerja Pejabat Esselon III	6	Baik
52	Layar Film/Projector	5	Baik
53	Lcd Monitor	3	Baik
54	Layar Proyektor	1	Baik
55	LCD Projector/Infocus	7	Baik
56	Lemari Buku Untuk Perpustakaan	2	Baik
57	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	6	Baik
58	Microphone/Wireless MIC	11	3 Rusak Berat, 8 Kurang Baik
59	Uninterruptible Power Supply (UPS)	17	5 Rusak Berat, 12 Baik
60	Camera Electronic	2	Rusak Berat
61	Alat Studio Lainnya	2	Baik
62	Alat Komunikasi Telephone Lainnya (dst)	7	Rusak Berat
63	Alat Kesehatan Kebidanan	2	Rusak Berat
64	Komputer Jaringan Lainnya	7	Baik

65	P.C Unit	35	5 Rusak Berat, 6 Kurang Baik, 24 Baik
66	Personal Komputer Lain-lain	1	Baik
67	Lap Top	11	2 Rusak Berat, 3 Kurang Baik, 6 Baik
68	Hardisk External	2	Baik
69	Scanner (Peralatan Mini Komputer)	1	Baik
70	Printer (Peralatan Personal Komputer)	30	3 Rusak Berat, 3 Kurang Baik, 24 Baik
71	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	2	Baik
72	Bangunan Gedung Kantor Permanen	8	Baik
73	Bangunan Gedung Kantor Lain-Lain	7	Baik
74	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	1	Baik
75	Bangunan Rumah Sakit Lain-Lain dst	1	Baik
76	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	1	Baik
77	Gedung Garasi/Pool Permanen	2	Baik
78	Bangunan Gedung Garasi/Pool Lain-lain (dst)	2	Baik
79	Selasar	1	Baik
80	Bangunan Fasilitas Umum Lainnnya	1	Baik
81	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	1	Baik
82	Sumur Dengan Pompa	2	Baik
83	Jaringan Listrik Lainnya	3	Baik
84	Lukisan Lain-lain	1	Baik

Sumber : Pengurus Barang Pengguna (30 Juni 2024)

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pangkalpinang

Dalam Sub Bab Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pangkalpinang akan dibahas antara lain:

1. Kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pangkalpinang berdasarkan capaian pelaksanaan program dan kegiatan.

Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pangkalpinan pada Renstra Perubahan Tahun 2013-2018 mulai tahun 2020 Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan

Keluarga Berencana Kota Pangkalpinang memiliki 3 (tiga) urusan yaitu urusan pemberdayaan perempuan perlindungan anak, urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta urusan pemberdayaan masyarakat.

Adapun program dan kegiatan pada periode 2018-2023 sebagaimana diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 2.3.1
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA PANGKALPINANG
TAHUN 2021-2023

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Capaian Kinerja		
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100%	100%	100%
	Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/kualifikasi pada unit kerjanya	76,47%	64,28%	100%
	Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	100%	100%	100%
	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100%	100%	100%
Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase ARG pada Belanja Langsung	2,37%	3,84%	2,4%
Program Perlindungan Perempuan	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 Tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual atau emosional) oleh pasangan atau manatan pasangan selain pasangan dalam 12 bulan terakhir	0,034%	0,066%	0,080%

Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase kader yang aktif melaksanakan KIE kepada Masyarakat		100%	
Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Proporsi perempuan yang berada diposisi manajerial	8,82%	13,39%	6,89%
Program Pemenuhan Hak Anak	Persentase pengembangan forum anak skala kota	100%	100%	100%
Program Perlindungan Khusus Anak	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan	0,060%	0,16%	0,13%
Program pengendalian Penduduk	TFR (Tota Fertility Rate)	2	1,98	2,26
Program Pembinaan Keluarga Berencana	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada pasangan usia subur (PUS) usia 15-49 Tahun yang berstatus kawin	77,94%	98,14%	66,82%
	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 Tahun) atau pasangan yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern	77,94%	98,14%	66,02%
Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Spesific Fertility Rate/ASFR 15-19)	8,26 Kelahiran Per 1000 WUS	8,20 Kelahiran Per 1000 WUS	15,55 Kelahiran Per 1000 WUS
	Persentase peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat kab/kota dalam pembangunan	100%	100%	100%

2.4 Tantangan dan Peluang Pelayanan OPD (tambahkan berdasarkan analisis SWOT)

2.4.1. Tantangan

Tantangan (Threats) yang dihadapi dalam Pelayanan DP3AKB Kota Pangkalpinang antara Lain :

1. Pertumbuhan dan mobilisasi penduduk tinggi.
2. Masih tingginya ketimpangan gender dilihat dari nilai IDG.
3. Meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

2.4.2. Peluang

Peluang (opportunity) yang dihadapi dalam pelayanan DP3AKB Kota Pangkalpinang Antara lain :

1. Adanya koordinasi lintas sektor.
2. Adanya media informasi massa.
3. Adanya kader PPKBD dan Sub PPKBD
4. Adanya forum gender.
5. Adanya forum anak.
6. Adanya Lembaga independent yang mendukung kegiatan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
7. Adanya Kader Pembangunan Manusia (KPM)

2.4.3. Kekuatan

Sedangkan kekuatan (stenght) yang ada pada DP3AKB Kota Pangkalpinang Antara lain :

1. Komitmen Pimpinan dan pegawai dalam pelaksanaan tugas.
2. Adanya Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) dan Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB)

2.4.4. Kelemahan

Sedangkan kelemahan (weakness) yang ada pada DP3AKB Kota Pangkalpinang Antara lain :

1. Kurangnya sumber daya aparatur yang kompeten dan professional Terutama untuk penanganan kasus tindak kekerasan.
2. Dukungan dana APBD yang belum memadai.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan di dalam proses penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pangkalpinang, dalam hal ini untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan *akseptabilitas* prioritas pembangunan yang dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertangggungjawabkan.

Melalui pengintegrasian kajian berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pangkalpinang secara umum dan dengan memperhatikan tantangan dan permasalahan mengacu pada hasil telaahan terhadap RPD Kota Pangkalpinang 2024-2026, Renstra Kementerian/Lembaga, sebagaimana telah diuraikan dalam Bab II Gambaran Pelayanan PD, dapatlah disusun isu-isu strategis yang akan menjadi landasan penyusunan tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pangkalpinang sampai dengan tahun mendatang.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Sesuai dengan Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 15 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unsur Pelaksana Teknis Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan penyelenggaran urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Urusan Pemberdayaan Masyarakat berdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan.

Pada sub ini akan diuraikan identifikasi permasalahan yang harus dihadapi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pangkalpinang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Masih rendahnya jumlah ASN yang memenuhi standar kompetensi/kualifikasi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pangkalpinang.
2. Belum optimalnya anggaran berbasis gender di Kota Pangkalpinang.
3. Belum optimalnya Lembaga yang melaksanakan PPRG.
4. Meningkatnya jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
5. Masih banyak masyarakat yang tidak ingin anak lagi dan menjarangkan umur anak tetapi tidak ingin ber-KB.
6. Kurangnya minat masyarakat terhadap KB MKJP.
7. Kurangnya akses untuk memperoleh berbagai pelayanan dalam peningkatan kemampuan dan keterampilan mengembangkan usaha ekonomi produktif dalam meningkatkan pendapatannya.
8. Belum optimalnya peran kelembagaan dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

3.2. Telaah Tujuan, Sasaran dan Program Daerah

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pangkalpinang, untuk tahun 2024-2026 mendukung Tujuan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) yaitu :

1. Mewujudkan sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat yang berdaya saing

   Dengan sasaran :

   - Meningkatnya keterlibatan dan partisipasi perempuan dalam pembangunan

2. Meningkatkan tata Kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang baik menuju tercapainya good governance

   Dengan Sasaran

   - Meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis IT

Faktar pendorong dan penghambat yang dihadapi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pangkalpinang dalam pencapaian Tujuan dan Sasaran daerah tercantum pada tabel berikut ini:

Tabel 3.2.1
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Terhadap Pencapaian Tujuan, Sasaran Rencana Pembangunan Daerah

No	Tujuan dan Sasaran RPD Kota Pangkalpinang	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Tujuan : Mewujudkan sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat yang berdaya saing Sasaran : Meningkatnya keterlibatan dan partisipasi perempuan dalam pembangunan	Belum optimalnya update data Pembangunan Gender Masih adanya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang tidak dilaporkan	Masih kurangnnya partisipasi dari lintas sektor (swasta, masyarakat, dan OPD lain) dalam pencapaian pengarusutamaan gender dan anak Masih rendahnya keterlibatan perempuan dalam bidang ekonomi dan politik Rendahnya peran masyarakat dalam proses penanganan kasus	Adanya komitmen kepala daerah untuk meningkatkan Pemberdayaan Gender Adanya Sosialisasi dan penguatan regulasi tentang perlindungan terhadap perempuan termasuk TPPO Ada pihak lintas sektor yang terlibat dalalm penyelesaian kasus seperti POLRI dan Tim Gugus Tugas
2.	Tujuan : Meningkatkan tata Kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang baik menuju	Kurangnya SDM untuk yang berkompeten terkait dengan aplikasi pelayanan berbasis IT	Belum adanya aplikasi pelayanan yang berbasis IT	Adanya komitmen kepala daerah untuk meningkatkan kualitas

No	Tujuan dan Sasaran RPD Kota Pangkalpinang	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	tercapainya good governance Sasaran : Meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis IT			pelayanan berbasis IT

3.3 TELAAHAN RENSTRA K/L dan RENSTRA PERANGKAT DAERAH PROVINSI

3.3.1 Telaahan Renstra K/L

Pada sub ini akan diuraikan identifikasi permasalahan yang harus dihadapi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pangkalpinang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya terkait pelaksanaan sasaran jangka menengah Renstra Kementerian/Kelembagaan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPA) serta Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

Sebagaimana yang diamanatkan dalam RPJMN 2020-2024, Visi Pembangunan Nasional yang merupakan Visi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia tahun 2020-2024 adalah: "**Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong**."

a) Telaahan Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Visi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI tahun 2020-2024 adalah:

" Kementerian yang Peduli (Profesional, Ekual, Dedikasi, Unggul, Loyal dan Integritas) dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan

Dalam rangka mewujudkan visi ini maka misi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI adalah :

1. Peningkatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan dari kekerasan termasuk TPPO;
2. Peningkatan perlindungan anak; dan
3. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Tujuan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai berikut :

1. Meningkatan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Hak perempuan.

   Sasaran strategi yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah:

   a. Meningkatnya kualitas hidup perempuan.
   b. Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan.

2. Meningkatkan Pemenuhan Hak anak

   Sasaran strategis yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah:

   a. Meningkatnya kualitas tumbuh kembang anak.
   b. Meningkatnya kapasitas kelembagaan pemenuhan hak serta perlindungan khusus anak.
3. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dan Kualitas Keluarga dalam Pembangunan PPPA

   Sasaran strategi yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah:

   a. Meningkatnya partisipasi masyarakat.
   b. Meningkatnya kualitas keluarga dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak untuk mewujudkan kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak.

4. Meningkatnya Perlindungan Hak Perempuan dari kekerasan termasuk TPPO

   Sasaran strategis yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah:

   a. Menurunnya segala bentuk kekerasan terhadap perempuan di ruang publik, dimestik, tempat kerja, situasi darurat kondisi khusus, dan perempuan korban TPPO.
   b. Meningkatnya layanan bagi perempuan korban kekerasan dan TPPO.

5. Meningkatnya Perlindungan Khusus Anak

   Sasaran strategis yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah:

   a. Meningkatnya layanan bagi anak korban kekerasan dan yang memerlukan perlindungan khusus.

6. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Kementrian Pemberdayaan Perempuan, Perlindungn Anak.

   Sasaran strategis yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah:

   a. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik di Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Telaahan Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sesuai dengan tugas dan fungsinya, perangkat daerah mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPA). Adapun tujuan dan sasaran (KPPA) yang terkait dengan pelayanan perangkat daerah adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan hak perempuan

   Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan ke-1 adalah sebagai berikut:

   - Meningkatnya capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG).
   - Meningkatnya capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).

2. Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak

   Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan ke-2 adalah sebagai berikut :

   - Meningkatnya kemampuan pemenuhan hak anak

3. Meningkatkan Perlindungan Hak Perempuan dari Kekerasan termasuk TPPO

   Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan ke-4 adalah sebagai berikut:

   - Menurunnya kasus tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO.
   - Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO.

4. Meningkatkan perlindungan khusus anak

   Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan ke-5 adalah sebagai berikut :

   - menurunnya kasus tindak kekerasan terhadap anak
   - Meningkatnya kualitas sistem layanan perlindungan khusus anak.

Faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian sasaran renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI tercantum pada tabel berikut.

Tabel 3.3.1
Permasalahan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pangkalpinang berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kemen PPPA RI	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Meningkatnya capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Belum optimalnya update data Pembangunan Gender	1. Masih kurangnnya partisipasi dari lintas sektor (swasta, masyarakat, dan OPD lain) dalam pencapaian pengarusutamaan gender dan anak	Adanya komitmen kepala daerah untuk meningkatkan Pemberdayaan Gender
2.	Meningkatnya capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Belum optimalnya update data Pemberdayaan Gender	2. Minimnya pemahaman pengarusutamaan gender di masyarakat	
3.	Menurunnya kasus tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	Masih adanya kasus kekerasan terhadap perempuan yang tidak dilaporkan	Rendahnya peran masyarakat dalam proses penanganan kasus	Adanya Sosialisasi dan penguatan regulasi tentang perlindungan terhadap perempuan termasuk TPPO Ada pihak lintas sektor yang terlibat dalalm penyelesaian kasus seperti POLRI, TIM GUGUS
4.	Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	Belum optimalnya dukungan regulasi kelembagaan terhadap penanganan kasus kekerasan perempuan termasuk TPPO		

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kemen PPPA RI	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
5.	Meningkatnya kemampuan pemenuhan hak anak	Belum optimalnya pemenuhan hak anak, dilihat dari skor Kota layak Anak yang baru mencapai 500	Belum adanya dukungan regulasi kelembagaan terhadap pemenuhan hak anak`	Adanya komitmen kepala daerah untuk meningkatkan kemampuan pemenuhan hak anak Adanya PUSBAGA
6.	Menurunnya kasus tindak kekerasan terhadap anak	Masih adanya kasus kekerasan terhadap anak yang tidak dilaporkan	Rendahnya peran masyarakat dalam proses penanganan kasus	Adanya Sosialisasi tentang perlindungan terhadap anak Ada pihak lintas sektor yang terlibat dalam penyelesaian kasus seperti POLRI, TIM GUGUS, PATBM
7.	Meningkatnya kualitas sistem layanan perlindungan khusus kepada anak	Belum optimalnya dukungan regulasi terkait implementasi kebijakan perlindungan khusus anak	Belum adanya dukungan regulasi terkait implementasi kebijakan perlindungan khusus anak	Menerbitkan regulasi terkait implementasi kebijakan perlindungan khusus anak

b) Telaahan Renstra BKKBN

Visi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) adalah :

" Terwujudnya Keluarga Berkualitas dan Pertumbuhan Penduduk yang Seimbang Guna Mendukung Tercapaainya Indonesia Maju, Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong

Dalam rangka mewujudkan visi ini maka misi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) adalah :

1. Mengendalikan pertumbuhan penduduk dalam rangka menjaga kualitas dan struktur penduduk seimbang;
2. Menyelenggarakan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi secara komprehensif;
3. Menyelenggarakan pembangunan keluarga yang holistic integratif sesuai siklus hidup.
4. Membangun kemitraan, jejaring kerja, peran serta masyarakat dan kerjasama global.
5. Memperkuat inovasi, teknologi, informasi dan komunikasi.
6. Membangun kelembagaan, meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan SDM aparatur.

Tujuan BKKBN adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan keluarga berkualitas, yaitu keluarga yang tentram, mandiri dan bahagia.
2. Mengendalikan struktur penduduk menuju Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) dengan sumber daya manusia yang berkualitas sehingga terwujud bonus demogra yang bermanfaat bagi pembangunan.

Sasaran Strategis BKKBN adalah sebagai berikut :

1. Menurunnya Angka Kelahiran Total/Total Fertility Rate (TFR).
2. Meningkatnya Angka Prevalensi Rate (mCPR).

3. Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi/UnmetNeed .
4. Menurunnya Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur 15-19 Tahun/ Age Specific Fertility Ratio (ASFR) 15-19 Tahun.
5. Meningkatnya Indeks Pembangunan Keluarga (i Bangga)
6. Meningkatnya Median Usia Kawin Pertama (MUKP)

Telaahan Renstra Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) sesuai dengan tugas dan fungsinya, perangkat daerah mendukung pencapaian tujuan dan sasaran BKKBN. Adapun tujuan dan sasaran Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang terkait dengan pelayanan perangkat daerah adalah sebagai berikut:

1. Menurunnya Angka Kelahiran Total/Total Fertility Rate (TFR)
2. Meningkatnya Angka Prevalensi Rate (mCPR)
3. Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi/UnmetNeed
4. Menurunnya Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur 15-19 Tahun/ Age Specific Fertility Ratio (ASFR) 15-19 Tahun
5. Meningkatnya Median Usia Kawin Pertama (MUKP).

Faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian sasaran renstra Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) tercantum pada tabel berikut.

Tabel 3.3.2
Sasaran Renstra
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra BKKBN	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Meningkatnya Angka Kelahiran Total/ Total Fertility Rate	Masih banyaknya PUS yang belum menggunakan alat kontrasepsi	Pola pikir masyarakat yang masih erat dengan adat dan budaya serta faktor agama	Adanya Kader BKB, BKR, BKL
2.	Meningkatnya Angka Prevalence Rate (mCPR)			
3.	Menurunnya kebutuhan Ber-KB yang tidak terpenuhi/ UnmetNeed			
4.	Menurunnya Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur 15-19 Tahun/ Age Specific Fertility Ratio (ASFR) 15-19 Tahun			
5.	Meningkatnya Median Usia Kawin Pertama (MUKP)	Terbatasnya anggaran untuk sosialisasi PIK-R ke sekolah-sekolah	Kurangnya kegiatan yang mendukung untuk peningkatan MUKP	Adanya Duta Genre

c) Telaahan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Tujuan dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah :

1. Meningkatnya Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah;
2. Meningkatnya Pembangunan Responsif Gender;
3. Meningkatnya Kesejahteraan Anak;
4. Meningkatkan Peran keluarga dalam menekan laju pertumbuhan penduduk.

Sasaran Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah :

1. Meningkatnya Tata Kelola Internal Perangkat Daerah;
2. Meningkatnya peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik;
3. Meningkatnya pemenuhan hak terhadap anak;
4. Meningkatnya perlindungan khusus anak;
5. Menurunnya Angka Kelahiran Total;
6. Meningkatnya cakupan administrasi kependudukan.

Sesuai dengan tugas dan fungsi, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pangkalpinang mendukung pencapaian sasaran Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu :

1. Meningkatnya peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik;

2. Meningkatnya pemenuhan hak terhadap anak;
3. Meningkatnya perlindungan khusus anak;
4. Menurunnya Angka Kelahiran Total;

Faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian sasaran renstra Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, tercantum pada tabel berikut.

Tabel 3.3.3
Permasalahan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pangkalpinang berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra DP3ACSKB Prov Kep. Babel	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Meningkatnya peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik;	Belum optimalnya update data Pemberdayaan Gender	Masih kurangnya partisipasi dari lintas sektor (swasta, masyarakat, dan OPD lain) dalam pencapaian pengarusutaam aan gender dan anak Minimnya pemahaman pengarusutama an gender di masyarakat	Adanya komitmen kepala daerah untuk meningkatkan Pemberdayaan Gender
2.	Meningkatnya perlindungan khusus anak	Masih adanya kasus kekerasan terhadap anak yang tidak dilaporkan	Rendahnya peran masyarakat dalam proses penanganan kasus	Adanya Sosialisasi tentang perlindungan terhadap anak Ada pihak lintas sektor yang terlibat dalam penyelesaian kasus seperti POLRI, TIM GUGUS, PATBM
3.	Meningkatnya pemenuhan hak terhadap anak	Masih ada Perangkat Daerah yang belum	Masih adanya kekerasan terhadap anak	Adanya MOU antara Dinas terkait dengan

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra DP3ACSKB Prov Kep. Babel	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		memiliki Data Pilah	Masih belum terpenuhinya jaminan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar perempuan dan anak	sekolah-sekolah Sosialisasi rutin ke sekolah-sekolah tentang pemenuhan hak anak
4.	Menurunnya Angka Kelahiran Total	Banyak pasangan usia subur (PUS) yang mau menunda kehamilan namun enggan mengikuti program KB	Pola Pikir masyarakat yang masih erat dengan adat dan budaya serta faktor agama	Adanya Kader BKB, BKR, BKL, Kader PPKBD dan Sub PPKBD, PKB dan PLKB

d) Telaahan Renstra Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Tujuan dalam Renstra Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah :

1. Menurunnya penyandang masalah kesejahteraan sosial;
2. Meningkatnya Kesejahteraan masyarakat melaluipembangunan pemberdayaan masyarakat desa ;
3. Meningkatnya perlindungan social korban bencana;
4. Terwujudnya reformasi birokrasi perangkat daerah.

Sasaran Renstra Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah :

1. Meningkatnya PMKS yang mendapatkan perlindungandan jaminan sosial;

2. Meningkatnya pemberdayaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS);
3. Meningkatnya peran pemerintahan dan kelembagaan desa dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
4. Meningkatnya persentase korban bencana yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial masyarakat;
5. Meningkatnya tata kelola interal perangkat daerah.

Sesuai dengan tugas dan fungsi, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pangkalpinang mendukung pencapaian sasaran Renstra Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu :

1. Meningkatnya peran pemerintahan dan kelembagaan desa dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian sasaran renstra Renstra Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, tercantum pada tabel berikut.

Tabel 3.3.4
Permasalahan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pangkalpinang berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Dinsos PMD Kep. Babel	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Meningkatnya peran pemerintahan dan kelembagaan desa dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat	Belum optimalnya peran perangkat daerah untuk pemberdayaan masyarakat dikarenakan keterbatasan anggaran	Belum optimalnya peran kelembagaan dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat	Adanya Kader KPM

e. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Pangkalpinang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pangkalpinang Tahun 2011-2030. Tujuan penataan ruang wilayah kota adalah mewujudkan Kota Pangkalpinang sebagai kota perdagangan, jasa dan pariwisata skala regional, serta kota industri skala internasional dengan konsep water front city yang berwawasan lingkungan. Dengan demikian, faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana tidak berhubungan langsung dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.

3.4 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pangkalpinang secara umum dan dengan memperhatikan permasalahan mengacu pada Renstra Kementerian/Lembaga, Pencapaian TPB/SDGs dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Pangkalpinang 2024–2026 sebagaimana telah diuraikan di atas, maka dapatlah diidentifikasi isu-isu strategis yang akan menjadi landasan Badan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pangkalpinang tiga tahun mendatang sebagai berikut:

1. Peningkatan kompetensi/kualifikasi ASN pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pangkalpinang.
2. Mengoptimalkan anggaran berbasis gender di Kota Pangkalpinang.
3. Mengoptimalkan Lembaga yang melaksanakan PPRG.
4. Mengoptimalkan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
5. Melakukan sosialisasi tentang kesertaan ber-KB.
6. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat terhadap KB MKJP dan mengoptimalkan kinerja tenaga PKB dan PLKB.
7. Mempermudah akses untuk memperoleh berbagai pelayanan dalam peningkatan kemampuan dan keterampilan mengembangkan usaha ekonomi produktif dalam meningkatkan pendapatannya.
8. Mengoptimalkan peran kelembagaan dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pangkalpinang sebagai bagian integral dari Pemerintah Kota Pangkalpinang, yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam melaksanakan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan penyelenggaran urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Urusan Pemberdayaan Masyarakat berdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan, memiliki peran dan posisi strategis dalam kerangka pencapaian Tujuan dan Sasaran pembangunan jangka menengah Kota Pangkalpinang.

4.1. Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam Menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Tujuan yang akan dicapai dalam pelaksanaan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pangkalpinang dalam kurun waktu tahun 2024-2026 sebagai berikut :

1. Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan
   Indikator : Indeks Pemberdayaan Gender
2. Meningkatnya Pembangunan Keluarga
   Indikator : Indeks Pembangunan Keluarga
3. Mewujudkan Kelurahan dengan Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan yang Baik
   Indikator : Persentase Kelurahan dengan Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan yang Baik

4.2. Sasasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program perangkat daerah. Sasaran yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan

Keluarga Berencana Kota Pangkalpinang dalam kurun waktu tahun 2024-2026 sebagai berikut :

1. Meningkatnya Partisipasi Perempuan pada Lembaga Pemerintahan
   Indikator : Persentase Perempuan pada Lembaga Pemerintahan
2. Menurunnya Prevalensi Kekerasan Terhadap Perempuan
   Indikator : Prevalensi Kekerasan Terhadap Perempuan
3. Meningkatnya Nilai KLA
   Indikator : Predikat Kota Layak Anak
4. Tercapainya Penduduk Tumbuh Seimbang
   Indikator : Angka Kelahiran Total (TFR) Per WUS Usia 15-49 Tahun
5. Terwujudnya Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan yang Aktif dalam Upaya Peningkatan Keluarga Sejahtera
   Indikator : Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan yang Aktif dalam Upaya Peningkatan Keluarga Sejahtera

Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pangkalpinang yang tertuang dalam dokumen RPD Kota Pangkalpinang Tahun 2024 – 2026 dapat dilihat pada table 4.1 berikut:

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dalam rangka pencapaian Tujuan dan Sasaran RPD Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026

Tujuan RPD	Sasaran RPD	Indikator Tujuan/Sasaran RPD	Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Tujuan/Sasaran PD
Mewujudkan sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat yang berdaya saing		Indeks Pembangunan Manusia			
	Meningkatnya keterlibatan dan partisipasi perempuan dalam pembangunan	Indeks Pembangunan Gender			
			Meningkatnya pemberdayaan perempuan		Indeks Pemberdayaan Gender
				Meningkatnya partisipasi perempuan pada Lembaga pemerintahan	Persentase perempuan pada Lembaga pemerintahan
				Menurunnya prevalensi kekerasan terhadap perempuan	Prevalensi kekerasan terhadap perempuan
				Meningkatnya nilai KLA	Predikat Kota Layak Anak

Tujuan RPD	Sasaran RPD	Indikator Tujuan/Sasaran RPD	Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Tujuan/Sasaran PD
			Meningkatnya pembangunan keluarga		Indeks Pembangunan Keluarga
				Tercapainya penduduk tumbuh seimbang	Angka Kelahiran Total (TFR) Per WUS Usia 15-49 Tahun
Meningkatkan tata Kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang baik menuju tercapainya good governance		Indeks Reformasi Birokrasi			
	Meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis IT	Indeks Kepuasan Masyarakat			
			Mewujudkan kelurahan dengan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan yang baik		Persentase kelurahan dengan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan yang baik
				Terwujudnya Lembaga kemasyarakatan di kelurahan yang aktif dalam upaya peningkatan keluarga sejahtera	Persentase Lembaga kemasyarakatan di kelurahan yang aktif dalam upaya peningkatan keluarga sejahtera

Berdasarkan uraian tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pangkalpinang yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Daerah yang tertuang dalam RPD Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026, dapat disimpulkan beberapa indikator yang menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pangkalpinang, seperti yang tergambarkan pada tabel berikut:

Tabel 4.2
Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pangkalpinang Tahun 2024 – 2026

Tujuan/Sasaran (IKU) Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran (IKU) Perangkat Daerah	Definisi Operasional
Meningkatnya pemberdayaan perempuan	**Indeks Pemberdayaan Gender**	
Meningkatnya partisipasi perempuan pada Lembaga pemerintahan	Persentase perempuan pada Lembaga pemerintahan	Jumlah pekerja perempuan di Lembaga pemerintahan dibagi jumlah pekerja perempuan dikali 100
Menurunnya prevalensi kekerasan terhadap perempuan	Prevalensi kekerasan terhadap perempuan	Jumlah korban perempuan yang mengalami kekerasan dibagi jumlah penduduk perempuan dikali 100
Meningkatnya nilai KLA	Predikat Kota Layak Anak	
Meningkatnya pembangunan keluarga	**Indeks Pembangunan Keluarga**	
Tercapainya penduduk tumbuh seimbang	Angka Kelahiran Total (TFR) Per WUS Usia 15-49 Tahun	
Mewujudkan kelurahan dengan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan yang baik	**Persentase kelurahan dengan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan yang baik**	**Jumlah kelurahan dengan penyelenggaraan pemerintahan yang baik tahun berkenaan dibagi jumlah total kelurahan dikali 100**
Terwujudnya Lembaga kemasyarakatan di kelurahan yang aktif dalam upaya peningkatan keluarga sejahtera	Persentase Lembaga kemasyarakatan di kelurahan yang aktif dalam upaya peningkatan keluarga sejahtera	Jumlah kelurahan dengan Lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam upaya peningkatan keluarga sejahtera dibagi jumlah total kelurahan dikali 100

Berdasarkan beberapa uraian dan penjelasan terkait Tujuan dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana tahun 2024-2026, diperlukan penentuan target atas indikator kinerja yang ditetapkan. Hal ini dilakukan dalam rangka untuk mengetahui tingkat ketercapaian atas kinerja yang dihasilkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana setiap tahunnya.

Data target indikator kinerja tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pangkalpinang tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.3
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Realisasi	Target Kinerja			Kondisi Akhir
				2021	2024	2025	2026	
Meningkatnya pemberdayaan perempuan		Indeks Pemberdayaan Gender	Indeks	61,19	61,29	61,39	61,49	61,49
	Meningkatnya partisipasi perempuan pada Lembaga pemerintahan	Persentase perempuan pada Lembaga pemerintahan	%	-	20	22	24	24
	Menurunnya prevalensi kekerasan terhadap perempuan	Prevalensi kekerasan terhadap perempuan	%	0,015	0,014	0,013	0,012	0,012
	Meningkatnya nilai KLA	Predikat Kota Layak Anak	Predikat	Madya (635)	Nindya (701-800)	Nindya (701-800)	Nindya (701-800)	Nindya (701-800)
Meningkatnya pembangunan keluarga		Indeks Pembangunan Keluarga	Indeks	56,89	56,93	56,97	57	57
	Tercapainya penduduk tumbuh seimbang	Angka Kelahiran Total (TFR) Per WUS Usia 15-49 Tahun	Rata-rata anak per-wanita	2	2	2	2	2

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Realisasi	Target Kinerja			Kondisi Akhir
				2021	2024	2025	2026	
Mewujudkan kelurahan dengan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan yang baik		Persentase kelurahan dengan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan yang baik	%		100	100	100	100
	Terwujudnya Lembaga kemasyarakatan di kelurahan yang aktif dalam upaya peningkatan keluarga sejahtera	Persentase Lembaga kemasyarakatan di kelurahan yang aktif dalam upaya peningkatan keluarga sejahtera	%		100	100	100	100

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pangkalpinang menetapkan tujuan dan sasaran jangka menengah yang akan dicapai dalam 3 (tiga) tahun ke depan adalah melalui:

1. Meningkatkan peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik
2. Meningkatkan SDM perlindungan perempuan;
3. Meningkatkan Perlindungan Khusus Anak dan pemenuhan hak-hak anak;
4. Meningkatkan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
5. Meningkatkan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi program pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana;
6. Meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang holistik dan integratif;
7. Meningkatkan kapasitas kelurahan, penyediaan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat.

5.2 Arah Kebijakan

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan yang diambil Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pangkalpinang dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan perangkat daerah yang menerapkan anggaran berbasis gender;
2. Peningkatan kualitas SDM perlindungan perempuan dengan menitikberatkan pada pelayanan prima;

3. Peningkatan perlindungan khusus anak dan pemenuhan hak-hak anak;
4. Penguatan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
5. Peningkatan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi program pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana;
6. Penguatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga di kampung KB;
7. Peningkatan kapasitas kelurahan, peningkatan penyediaan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat pada setiap kelurahan.

Keterkaitan antara strategi dan arah kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pangkalpinang dalam tiga tahun mendatang dicantumkan pada tabel berikut ini.

Tabel 5.1
Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Pelayanan
Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pangkalpinang

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Pogram
Meningkatnya pemberdayaan perempuan	Meningkatnya partisipasi perempuan pada Lembaga pemerintahan	Meningkatkan peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik	Peningkatan perangkat daerah yang menerapkan anggaran berbasis gender;	1. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan 2. Program Pengelolaan Sistem Data Gender
	Menurunnya prevalensi kekerasan terhadap perempuan	Meningkatkan SDM perlindungan perempuan	Peningkatan kualitas SDM perlindungan perempuan dengan menitikberatkan pada pelayanan prima	1. Program Perlindungan Perempuan
	Meningkatnya nilai KLA	Meningkatkan Perlindungan Khusus Anak dan Pemenuhan Hak-Hak Anak	Peningkatan Perlindungan terhadap Anak dan Pemenuhan Hak-Hak Anak	1. Program Perlindungan Khusus Anak 2. Program Pemenuhan Hak-Hak Anak
Meningkatnya pembangunan keluarga	Tercapainya penduduk tumbuh seimbang	Meningkatkan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Penguatan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Program Pengendalian Penduduk
		Meningkatkan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi program pembangunan keluarga, kependudukan dan	Peningkatan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi program pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana	Program Pembinaan Keluarga Berencana

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Pogram
		keluarga berencana		
		Meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang holistik dan integratif	Penguatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga di kampung KB	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sehjahtera
Mewujudkan kelurahan dengan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan yang baik	Terwujudnya Lembaga kemasyarakatan di kelurahan yang aktif dalam peningkatan keluarga sejahtera	Meningkatkan kapasitas kelurahan, penyediaan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat	Peningkatan kapasitas kelurahan, Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat pada setiap kelurahan	1. Program Administrasi Pemerintahan Desa 2. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

Sumber: Renstra Dinas PPPAKB Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026

BAB VI
PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pangkalpinang yang akan dilaksanakan merupakan bagian dari program pembangunan Kota Pangkalpinang yang berisi program untuk mewujudkan visi dan misi kota.

Adapun rencana program, kegiatan dan sub Tahun 2024-2026 terdiri dari 10 Program, 26 kegiatan dan 94 Sub kegiatan sebagaimana rincian berikut :

1.			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**
	1.		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**
		1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
		2.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
		3.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
		4.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
		5.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
		6.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	2.		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**
		7.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
		8.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
		9.	Pengelolaan dan Penyiapan bahan Tanggapan Pemeriksaan
		10.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Triwulanan/Semesteran SKPD
		11.	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
	3.		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**
		12.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
		13.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
		14.	Monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai
	4.		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**
		15.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
		16.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
		17.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
		18.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
		19.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
		20.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

		21.	Penataan Arsip Dinamis Pada SKPD
		22.	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
	5.		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
		23.	Pengadaan Mebel
		24.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
		25.	Pengadaan Aset Tetap Lainnya
		26.	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
		27.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
		28.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	6.		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
		29.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
		30.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
		31.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	7.		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
		32.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
		33.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan
		34.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya
		35.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
		36.	
2.			**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**
	8.		**Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota**
		37.	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG
		38.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota
		39.	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG
		40.	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG
	9.	41.	**Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota**
		42.	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi
		43.	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi

	10.		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota**
		44.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
3.			**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**
	11.		**Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**
		45.	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota
4.			**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**
	12.		**Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**
		46.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/kota
		47.	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
	13.		**Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota**
		48.	Penyedian Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
		49.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
	14.		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**
		50.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
		51.	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
5.			**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**
	15.		**Penyediaan Layanan Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**
		52.	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		53.	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK
	16.		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**
		54.	Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota
6.			**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**
	17.		**Pemanduan dan Singkroniasi Kebajikan Pemeritah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kota dalam Rangka Pengendalian Kualitas Penduduk**
		55.	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota
		56.	Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga

		57.	Pelaksanaan Rapat Pengendlian Program Bangga Kencana
	18.		**Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kota**
		58.	Penyusunan Profil Program Pembangunan Keluarga,Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)
		59.	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan
		60.	Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain
		61.	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga
		62.	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga
		63.	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga
		64.	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB
		65.	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Programm Bangga Kencana
7.			**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**
	19.		**Pelaksanaan Advokasi Komunikasi, Informasi Dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal**
		66.	Advokasi Program Bangga Kencana oleh Pokja Advokasi Kepada Stakeholders dan Mitra Kerja
		67	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana Sesuai Kearifan Budaya Lokal
		68.	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangga Kencana
		69.	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang
		70.	Penggunaan Media Massa Cetak, Elektronik dan Media Lainnya sesuai Kearifan Budaya Lokal dalam Pencitraan Program KKBPK
		71.	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes) dan Mini Lokakarya (Minilok)
		72.	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana
		73.	Pengendalian Program KKBPK
	20.		**Pendayagunaan Tenaga Penyuuh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)**
		74.	Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB
		75.	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB
		76.	Fasilitasi Pelaksanaanya Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)
	21.		**Pengendalian dan Pendistribusi Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota**
		77.	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang

			Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya
		78.	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
		79.	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB
		80.	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya
		81.	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak
	22.		**Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB**
		82.	Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyrakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
		83.	Intergrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB
		84.	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas
8.			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**
	23.		**Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**
		85.	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL,PPPKS,PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))
		86.	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutanusia serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)
	24.		**Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**
		87.	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Beresiko Stuntung (Termasuk Remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca Salin/Kelahiran, Baduta/Balita)
		88.	Pendampingan Keluarga Beresiko Stunting (Termasuk Remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca Salin/Kelahiran, Baduta/Balita)
9.			**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**
	25.		**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintah Desa**
		89.	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan
10.			**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**
	26.		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama Dalam Daerah Kabuapten/Kota**
		90.	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu,LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
		91.	Fasilitas Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu,LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat

		92.	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
		93.	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
		94.	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga

Secara rinci rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif secara rinci tercantum pada Tabel 6.1 berikut (terlampir):

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAKAN URUSAN

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pangkalpinang adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

Indikator kinerja penyelenggaraan urusan adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pangkalpinang dalam tiga tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026. Target indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pangkalpinang yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026 ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pangkalpinang selama tiga tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pangkalpinang. Indikator kinerja penyelenggaraan urusan ini ditampilkan dalam Tabel 7.1 sebagai berikut:

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026

No.	Program	Indikator Program	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPD	Target			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD
					2024	2025	2026	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	65,68	67	69	71	71
		Indeks Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah	Nilai	NA	85	90	95	95
	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase ARG organisasi perangkat daerah pada APBD	%	2,37	2,40	2,43	2,46	2,46
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio kekerasan terhadap perempuann termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Rasio	15,25	14,35	13,46	12,56	12,56
	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase fasilitas pemerintah dan fasilitas Kesehatan ramah anak sesuai standar	%	NA	30	34	38	38
	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Prevalensi kekerasan terhadap anak	%	0,42	0,41	0,39	0,37	0,37
	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase tersedianya data keluarga dan KB di kelurahan	%	100	100	100	100	100
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA	Angka kelahiran (remaja perempuan umur 15-19 tahun per 1000 perempuan usia 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate 15-19)	Kelahiran per 1000 WUS	8,26	8,23	8,20	8,17	8,17

		Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan perangkat daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	%	100	100	100	100	100
		Persentase pemakaian kontrasepsi modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/Mcpr)	%	77,94	78,00	78,20	78,40	78,40
		Persentase Kebutuhan Ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmeet Need)	%	7,66	7,62	7,58	7,54	7,54
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR) dan Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	%	83,7	83,72	83,74	83,76	83,76
		Cakupan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	%	100	100	100	100	100
		Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja Mahasiswa	%	64,28	66,66	69,04	71,42	71,42
	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Kelurahan dengan Kinerja Baik	%	100	100	100	100	100
	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase LKK Aktif	%	100	100	100	100	100

BAB VIII
PENUTUP

8.1 Pedoman Transisi

Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pangkalpinang Tahun 2024–2026 adalah selama tiga tahun. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Renstra Tahun 2024-2026 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pangkalpinang Tahun 2027, dengan tetap berpedoman pada RPJPD Kota Pangkalpinang Tahun 2005 - 2025.

8.2 Kaidah Pelaksanaan

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pangkalpinang tahun 2024-2026 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pangkalpinang agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pangkalpinang dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pangkalpinang yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2024 hingga tahun 2026. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja wajib berpedoman pada Renstra.

4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pangkalpinang sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

TABEL 6.1
RENCANA PROGRAM KEGIATAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2024 - 2026

Tujuan Kota	Sasaran Kota	Tujuan Dinas PPPAKB	Sasaran Dinas PPPAKB	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Formula/Rumus Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target						Kondisi Kinerja Akhir Periode RPD	Pagu	Penanggung Jawab
									Tahun 2021	2024	Pagu	2025	Pagu	2026	Pagu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12		13		14		15
Mewujudkan Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Masyarakat yang Berdaya Saing						INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA		INDEKS	78.57	79.89		80.31		80.72		80.72		KEPALA DAERAH
	Meningkatnya Keterlibatan dan Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan					INDEKS PEMBANGUNAN GENDER		INDEKS	93.25	93.57		93.68		93.79		93.79		KEPALA DAERAH
		Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan				Indeks Pemberdayaan Gender		Indeks	61.19	61, 29		61.39		61.49		61.49		KEPALA DPPPAKB
			Meningkatnya Partisipasi Perempuan pada Lembaga Pemerintahan			Persentase Perempuan Pada Lembaga Pemerintahan	Jumlah pekerja perempuan di lembaga pemerintahan) ; jumlah pekerja perempuan x 100	%	N/A	20		22		24		24.00		KEPALA DPPPAKB
				PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Meningkatnya Persentase ARG pada belanja langsung	Persentase ARG Organisasi Perangkat Daerah pada APBD	Jumlah belanja ARG pada APBD/Jumlah Total Belanja Pada APBD x 100%	%	2.37	2.40	203,000,000	2.43	219,000,000	2.46	204,000,000	2.46	626,000,000	BIDANG PPPA
				Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Program PUG Pada Perangkat Daerah yang Sudah Dievaluasi Melalui Analisis Gender Tingkat Kabupaten/Kota		Program	N/A	13	101,000,000	14	107,000,000	15	102,000,000	15	310,000,000	
				Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota		Dokumen		1	50,000,000	1	55,000,000	1	50,000,000	3	155,000,000	
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenanangan Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota		Dokumen		1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	3	3,000,000	
				Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG)	Jumlah Perangkat Daerah Yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota		Perangkat Daerah		33	40,000,000	33	50,000,000	33	50,000,000	33	140,000,000	

				Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Terlaksananya Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) bagi Organisasi Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah Yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota		Perangkat Daerah		33	10,000,000	33	1,000,000	33	1,000,000	33	12,000,000	
				Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Upaya Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Upaya Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan yang dilaksanakan pada tahun berkenaan dibagi target upaya yang akan dilaksanakan tahun berkenaan x 100%	%		100	101,000,000	100	111,000,000	100	101,000,000	100	313,000,000	
				Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Terlaksananya Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota		Dokumen		1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	3	3,000,000	DPPPAKB
				Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Meningkatnya Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota		Organisasi		30	100,000,000	30	110,000,000	30	100,000,000	30	310,000,000	DPPPAKB
				Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Pemerintah Daerah Tingkat Kabupaten/ Kota yang Telah Dilatih PUG		Perangkat Daerah	-	33	1,000,000	33	1,000,000	33	1,000,000	33	3,000,000	
				Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas		Orang	-	66	1,000,000	66	1,000,000	66	1,000,000	66	3,000,000	DPPPAKB
				PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	**Meningkatnya Penerapan PPRG pada Kabupaten/ Kota**	**Persentase Perangkat Daerah yang Melaksanakan PPRG**	**Jumlah Perangkat Daerah yang Melaksanakan PPRG/ Jumlah Perangkat Daerah x 100%**	**%**		**36**	**70,000,000**	**40**	**70,000,000**	**42**	**70,000,000**	**42**	**210,000,000**	**BIDANG PPPA**
				Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tersusunnya Dokumen Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pengolahan Analisis dan Penyajian data Gender dan Anak yang tersusun tahun berkenaan dibagi Jumlah target dokumen yang akan disusun tahun berkenaan x 100%	%	-	100	70,000,000	100	70,000,000	100	70,000,000	100	210,000,000	
				Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia		Dokumen	-	1	70,000,000	1	70,000,000	1	70,000,000	3	210,000,000	DPPPAKB
			Menurunnya Prevalensi Kekerasan Terhadap Perempuan			**Prevalensi Kekerasan Terhadap Perempuan**	**Jumlah Korban Perempuan yang Mengalami Kekerasan/ Jumlah Penduduk Perempuan x 100**	**%**	**0.015**	**0.014**		**0.013**		**0.012**		**0.012**		**KEPALA DPPPAKB**

				PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	**Meningkatnya Kualitas Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan termasuk TPPO**	**Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan termasuk TPPO (per 100.000 Penduduk Perempuan)**	**Jumlah Perempuan yang Mengalami Kekerasan / Jumlah Penduduk Perempuan x 100.000**	**Rasio**	**15.25**	**14.35**	**264,000,000**	**13.46**	**333,000,000**	**12.56**	**338,000,000**	**12.56**	**935,000,000**	**BIDANG PPA/UPTD PPPA**
				Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Media Massa (Cetak, Elektronik) yang bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota (Dinas PPA) Untuk Melakukan KIE Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan		Media		2	73,000,000	2	73,000,000	2	73,000,000	6	219,000,000	
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan kewenangan Kabupaten/Kota		Dokumen		1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	3	3,000,000	DPPPAKB
				Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota		Perangkat Daerah		33	72,000,000	33	72,000,000	33	72,000,000	33	216,000,000	DPPPAKB
				Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Korban Kekerasan Perempuan yang Terlayani	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang Dilayani dibagi Total Jumlah Perempuan Korban Kekerasan x 100%	%		100	100,000,000	100	150,000,000	100	150,000,000	100	400,000,000	
				Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan		Orang		16	50,000,000	15	100,000,000	14	100,000,000	14	250,000,000	DPPPAKB
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan Yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota		Layanan		16	50,000,000	15	50,000,000	14	50,000,000	14	150,000,000	DPPPAKB
				Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang Bergerak Dalam Bidang Perempuan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pelatihan		Organisasi		20	91,000,000	20	110,000,000	20	115,000,000	20	316,000,000	
				Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan kabupaten/Kota	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas		Orang		40	46,000,000	40	55,000,000	40	60,000,000	40	161,000,000	DPPPAKB
				Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		Dokumen		1	45,000,000	1	55,000,000	1	55,000,000	3	155,000,000	DPPPAKB
			Meningkatnya Nilai KLA			**Predikat Kota Layak Anak**		**Predikat**	**Madya**	**701-800 (Nindya)**		**701-800 (Nindya)**		**701-800 (Nindya)**		**701-800 (Nindya)**		**KEPALA DPPPAKB**

				PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	**Terwujudnya Kota yang Memenuhi Hak Hak Anak**	**Persentase Fasilitas Pemerintah dan Fasilitas Kesehatan Ramah Anak Sesuai Standar**	**Jumlah Perangkat Daerah ramah Anak Sesuai Standar + Jumlah Fasilitas Kesehatan ramah Anak Sesuai Standar + Jumlah SD/MI dan SMP/MTs Ramah Anak Sesuai Standar / Jumlah Seluruh Perangkat Daerah, Fasilitas Kesehatan dan SD/MI dan SMP/MTs di Kota x 100%**	**%**		**30**	**172,500,000**	**34**	**197,500,000**	**38**	**197,500,000**	**38**	**567,500,000**	**BIDANG PPPA**
				Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha KewenanganKabupaten/Kota	Terlaksananya Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha KewenanganKabupaten/Kota	Jumlah Lembaga yang Telah Memenuhi Standar Pemenuhan Hak Anak		Lembaga		20	112,500,000	25	132,500,000	30	132,500,000	30	377,500,000	
				Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha		Organisasi		20	25,000,000	20	40,000,000	20	40,000,000	20	105,000,000	
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		Dokumen		1	87,500,000	1	92,500,000	1	92,500,000	3	272,500,000	
				Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Laporan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang disusun	Jumlah Laporan yang Disusun Tahun Berkenaan dibagi Jumlah Target Laporan x 100%	%		100	60,000,000	100	65,000,000	100	65,000,000	100	190,000,000	
				Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		Dokumen		1	60,000,000	1	65,000,000	1	65,000,000	3	190,000,000	DPPPAKB
				PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	**Terlaksananya Perlindungan Khusus Anak**	**Prevalensi kekerasan terhadap anak**	**Jumlah anak korban kekerasan / Jumlah Penduduk Anak x 100%**	**%**	**0.42**	**0.41**	**140,000,000**	**0.39**	**180,000,000**	**0.37**	**203,322,679**	**0.37**	**523,322,679**	**BIDANG PPPA DAN UPTD**
				Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Korban Kekerasan Anak yang Terlayani	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang Terlayani dibagi Total Jumlah Anak Korban Kekerasan x 100%	%	100	100	100,000,000	100	150,000,000	100	173,322,679	100	423,322,679	
				Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan		Orang		29	50,000,000	27	100,000,000	25	123,322,679	25	273,322,679	
				Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Terlaksananya Layanan AMPK yang Terintergrasi dan Komprehensif	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan		Orang		30	50,000,000	27	50,000,000	25	50,000,000	25	150,000,000	

				Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Layanan Anak yang Mendapat Pelatihan		Lembaga		15	40,000,000	15	30,000,000	15	30,000,000	45	100,000,000	
				Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota	Terselenggaranya KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah KIE Perlindungan khusus anak		Dokumen		1	40,000,000	1	30,000,000	1	30,000,000	3	100,000,000	DPPPAKB
		Meningkatnya Pembangunan Keluarga				**Indeks Pembangunan Keluarga**		**Indeks**	**56.89**	**56.93**		**56.97**		**57.00**		**57.00**		**KEPALA DPPPAKB**
			Tercapainya Penduduk Tumbuh Seimbang			**Angka Kelahiran Total (TFR) Per WUS Usia 15-49 tahun**		**Rata-Rata Anak per Wanita**	**2**	**2**		**2**		**2**		**2**		**KEPALA DPPPAKB**
				Program Pengendalian Penduduk	**Terlaksananya Penyediaan Data Keluarga dan KB**	**Persentase Tersedianya Data Keluarga dan KB di Kelurahan**	**Jumlah Kelurahan yang Memiliki Data Keluarga dan KB yang Lengkap dan Up to Date / Jumlah Kelurahan yang Ada x 100%**	**%**	**100**	**100**	**360,000,000**	**100**	**375,000,000**	**100**	**370,000,000**	**100**	**1,105,000,000**	**BIDANG P4**
				Pemaduan dan Singkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kota Dalam Rangka Pengendalian Kualitas Penduduk	Terlaksananya Pemaduan dan Singkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kota Dalam Rangka Pengendalian Kualitas Penduduk	Jumlah Laporan Pemaduan dan Singkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kota Dalam Rangka Pengendalian Kualitas Penduduk		Laporan		6	70,000,000	6	80,000,000	6	70,000,000	18	220,000,000	
				Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota		Dokumen		1	30,000,000	1	30,000,000	1	30,000,000	1	90,000,000	
				Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Non Formal	Terlaksananya Penguatan Kerja sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Non Formal	Jumlah Dokumen Penguatan Kerja sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Non Formal		Dokumen		0		0		0		0		
				Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Susuai Isu Lokal kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Susuai Isu Lokal kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Susuai Isu Lokal kabupaten/Kota		Dokumen		0		0		0		0		
				Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI, dan SLTP/MTS, Jalur Formal dan Informal	Terlaksananya Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI, dan SLTP/MTS, Jalur Formal dan Informal	Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI, dan SLTP/MTS, Jalur Formal dan Informal		Satuan Pendidikan		0		0		0		0		
				Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Terlaksananya Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Jumlah pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga		Kegiatan		1	30,000,000	1	30,000,000	1	30,000,000	3	90,000,000	

				Pelaksanaan Rapat Pengendlian Program Bangga Kencana	Terlaksananya Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)		Kegiatan		1	10,000,000	1	20,000,000	1	10,000,000	3	40,000,000	
				Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kota	Terlaksananya Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kota	Jumlah Laporan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kota		Laporan		9	290,000,000	9	295,000,000	9	300,000,000	27	885,000,000	
				Penyusunan Profil Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Terlaksananya penyusunan profil program Bangga Kencana tingkat Kabupaten/Kota Provinsi (termasuk diseminasi dan evaluasi hasil penyusunan profil pengendalian penduduk dan KB)	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga		Dokumen		1	30,000,000	1	30,000,000	1	35,000,000	3	95,000,000	
				Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Terlaksananya Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan		Dokumen		1	30,000,000	1	30,000,000	1	30,000,000	3	90,000,000	
				Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan	Terlaksananya Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan	Jumlah Kajian Dampak Kependudukan		Dokumen										
				Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain	Dibentuknya Rumah Data Kependudukan yang aktif di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk		Unit		12	60,000,000	14	65,000,000	14	65,000,000	14	190,000,000	
				Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga		Laporan		1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	3	150,000,000	
				Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Tersedianya Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedia		Dokumen		1	20,000,000	1	20,000,000	1	20,000,000	3	60,000,000	
				Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Terlaksananya Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga		Laporan		1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	3	150,000,000	
				Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Terlaksananya Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB		Dokumen		1	25,000,000	1	25,000,000	1	25,000,000	3	75,000,000	
				Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana)	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan		Laporan		1	25,000,000	1	25,000,000	1	25,000,000	3	75,000,000	

				PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)							**975,000,000**		**1,010,000,000**		**1,005,000,000**		**2,990,000,000**	
					Menurunya ASFR 15-19 Tahun	**Angka Kelahiran (Remaja Perempuan Umur 15-19 Tahun) per 1000 Perempuan Usia 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)**		**kelahiran per 1000 WUS**	**8.26**	**8.23**		**8.20**		**8.17**		**8.17**		
				Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Terlaksananya Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Laporan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal		Laporan		8	120,000,000	8	135,000,000	8	130,000,000	24	385,000,000	
				Advokasi Program Bangga Kencana Oleh Pokja Advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Terlaksananya Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja		Organisasi		10	20,000,000	12	20,000,000	14	20,000,000	14	60,000,000	
				Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Terlaksananya Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal		Dokumen		1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	3	15,000,000	
				Penyediaan dan distribusi sarana KIE Program Bangga Kencana	Terlaksananya Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana)	Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana)		Unit		9	25,000,000	9	25,000,000	9	25,000,000	27	75,000,000	
				Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang	Terlaksananya Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang		Dokumen		1	10,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000	3	30,000,000	
				Penggunaan Media Massa Cetak, Elektronik dan Media Lainnya Sesuai Kearifan Budaya Lokal dalam Pencitraan Program KKBPK	Terlaksananya Penggunaan Media Massa Cetak, Elektronik dan Media Lainnya Sesuai Kearifan Budaya Lokal dalam Pencitraan Program KKBPK	Jumlah Penggunaan Media Massa Cetak, Elektronik dan Media Lainnya		Kali		2	10,000,000	2	20,000,000	2	15,000,000	6	45,000,000	
				Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes) dan Mini Lokakarya (Minilok)	Terlaksananya Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes) dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes) dan Mini Lokakarya (Minilok)		Laporan		1	20,000,000	1	20,000,000	1	20,000,000	3	60,000,000	
				Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	Terkelolanya Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)		Laporan		1	20,000,000	1	25,000,000	1	25,000,000	3	70,000,000	
				Pengendalian Program KKBPK	Terlaksananya Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK		Laporan		4	10,000,000	4	10,000,000	4	10,000,000	12	30,000,000	

					Meningkatnya Cakupan PKB/ PLKB yang Didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Bidang Pengendalian Penduduk	**Cakupan PKB/ PLKB yang Didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Bidang Pengendalian Penduduk**	**Jumlah PKB dan PLKB yang didayagunakan/ Jumlah PKB dan PLKB x 100**	**%**		**100**		**100**		**100**		**100**		**BIDANG P4**
				Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Terlaksananya Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)		Laporan		4	120,000,000	4	140,000,000	4	140,000,000	12	400,000,000	
				Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Terlaksananya Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi Yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB		Organisasi		3	10,000,000	3	15,000,000	3	15,000,000	3	40,000,000	
				Penyediaan sarana pendukung Operasional PKB/PLKB	Tersedianya Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia		Unit		7	60,000,000	7	65,000,000	7	65,000,000	7	190,000,000	
				Fasilitasi pelaksanaan penyuluhan, penggerakan, pelayanan dan pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana / Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Terlaksananya Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangann Keluarga Berencana(PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)		Laporan		3	50,000,000	3	60,000,000	3	60,000,000	9	170,000,000	
				Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Terlaksananya Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan(IMP)		Orang									
					Meningkatnya Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence rate (mCPR)	**Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence rate (MCPR)**	**Jumlah Peserta KB Aktif Modern dibagi Jumlah Pasangan Usia Subur x 100%**	**%**	**77.94**	**78.00**		**78.20**		**78.40**		**78.40**		**BIDANG KBKS**
				Pengendalian dan pendistribusi kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengendalian dan pendistribusi kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) dibagi Jumlah Peserta KB Aktif x 100%	%	18.87	18.92	585,000,000	18.97	585,000,000	19.02	585,000,000	19.02	1,755,000,000	
				Pengendalian Pendistribusian alat dan obat kontrasepsi dan sarana penunjang pelayanan KB ke fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya	Terlaksananya Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya		Laporan		1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	3	150,000,000	
				Peningkatan kesertaan penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP)	Terwujudnya Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang Yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)		Orang		50	50,000,000	50	50,000,000	50	50,000,000	150	150,000,000	
				Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Tersedianya Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB		Unit		7	385,000,000	7	385,000,000	7	385,000,000	7	1,155,000,000	
				Pembinaan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya	Terlaksananya Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	JumlahLaporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya		Laporan		1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	3	150,000,000	

				Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Terlaksananya Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak		Laporan		7	50,000,000	7	50,000,000	7	50,000,000	21	150,000,000	
					Menurunnya Kebutuhan Ber-KB yang Tidak Terpenuhi (Unmeet Need)	**Persentase Kebutuhan Ber-KB yang Tidak Terpenuhi (Unmeet Need)**	**Jumlah PUS yang Tidak Ingin Anak Lagi/ Ingin anak ditunda tetapi Tidak Ber-KB dibagi Jumlah PUS x 100%**	**%**	**7.66**	**7.62**		**7.58**		**7.54**		**7.54**		**BIDANG KBKS**
				Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Terlaksananya Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Persentase Kesertaan Ber-KB di Kabupaten/ Kota dengan Kesertaan Rendah	Nilai Persentase KB yang terendah pada kecamatan di Kota Pangkalpinang	%	55.38	55.48	150,000,000	55.58	150,000,000	55.68	150,000,000	55.68	450,000,000	
				Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Terlaksananya Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB		Organisasi		12	50,000,000	12	50,000,000	12	50,000,000	12	150,000,000	
				Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Terintegrasinya Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB		Dokumen		3	50,000,000	3	50,000,000	3	50,000,000	9	150,000,000	
				Pelaksanaan dan pengelolaan program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Terwujudnya Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas Yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana)		Kampung		26	50,000,000	26	50,000,000	26	50,000,000	26	150,000,000	
				PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	**Meningkatnya Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR) dan Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB**	**Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR) dan Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB**	**Jumlah Anggota Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) + Jumlah Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) + Jumlah Anggota Kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB dibagi Jumlah Anggota Kelompok BKB+Jumlah Anngota Kelompok BKR+Jumlah Anggota Kelompok BKL x 100%**	**%**	**83.7**	**83.72**	**200,000,000**	**83.74**	**250,000,000**	**83.76**	**240,000,000**	**83.76**	**690,000,000**	**BIDANG KBKS**
					Meningkatnya Cakupan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di Setiap Kecamatan	**Cakupan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di Setiap Kecamatan**	**Jumlah PPKS/Jumlah Kecamatan x100%**	**%**	**100**	**100**		**100**		**100**		**100**		**KABID KBKS**
					Meningkatnya Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja /Mahasiswa	**Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja /Mahasiswa**	**PIK-R/M dibagi Jumlah Kelurahan x 100%**	**%**	**64.28**	**66.66**		**69.04**		**71.42**		**71.42**		**KABID KBKS**

				Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Terlaksananya Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) Seluruh Wanita Umur 25-49 tahun		Rata-Rata Usia Kawin	21	21.1	100,000,000	21.2	150,000,000	21.3	140,000,000	21.3	390,000,000	
				Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor(UPPKA)	Terlaksananya Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor(UPPKA)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor(UPPKA) yang Tersedia		Unit										
				Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor(UPPKA)	Terlaksananya Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor(UPPKA)	Jumlah Kader Yang Mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor(UPPKA)		Orang										
				Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor(UPPKA)	Tersedianya Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor(UPPKA)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor(UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan		Orang										
				Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor(UPPKA)	Terlaksananya Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)		Laporan				1	50,000,000	1	40,000,000	2	90,000,000	
				Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan Serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Terlaksananya Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan Serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan Serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)		Laporan		1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	3	300,000,000	
				Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Terlaksananya Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Keluarga yang Beresiko Stunting yang Mendapat Pendampingan dan Pemantauan		%		68	100,000,000	69	100,000,000	70	100,000,000	70	300,000,000	
				Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Beresiko Stuntung (Termasuk Remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca Salin/Kelahiran, Baduta/Balita)	Terlaksananya Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Beresiko Stuntung (Termasuk Remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca Salin/Kelahiran, Baduta/Balita)	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Beresiko Stuntung (Termasuk Remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca Salin/Kelahiran, Baduta/Balita)		Laporan		1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	3	150,000,000	
				Pendampingan Keluarga Beresiko Stunting (Termasuk Remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca Salin/Kelahiran, Baduta/Balita)	Terlaksananya Pendampingan Keluarga Beresiko Stunting (Termasuk Remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca Salin/Kelahiran, Baduta/Balita)	Jumlah Keluarga Beresiko Stunting (Termasuk Remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca Salin/Kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat Pendampingan		Laporan		1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	3	150,000,000	

Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Yang Baik Menuju Tercapainya Good Governance						**INDEKS REFORMASI BIROKRASI**		**NILAI**	**62.78**	**67.71**		**69.36**		**71**		**71**		**KEPALA DAERAH**
	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis IT					**INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT**		**INDEKS**	**N/A**	**84**		**85**		**86**		**86**		**KEPALA DAERAH**
		Mewujudkan Kelurahan Dengan Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan yang Baik				**Persentase Kelurahan Dengan Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan yang Baik**	**Jumlah Kelurahan dengan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik Tahun Berkenaan/ Jumlah Total Kelurahan x 100%**	**%**		**100**		**100**		**100**		**100**		**KEPALA DPPPAKB**
			Terwujudnya Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan yang Aktif dalam Upaya Peningkatan Keluarga Sejahtera			**Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan yang Aktif dalam Upaya Peningkatan Keluarga Sejahtera**	**Jumlah Kelurahan dengan Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif dalam upaya Peningkatan Keluarga Sejahtera/ Jumlah Total Kelurahan x 100**	**%**		**100**		**100**		**100**		**100**		**KEPALA DPPPAKB**
				PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	**Terlaksananya Administrasi Pemerintahan Desa**	**Persentase Kelurahan dengan Kinerja Baik**	**Jumlah Kelurahan dengan Kinerja Baik/ Jumlah Kelurahan yang Ada x 100%**	**%**		**100**	**50,000,000**	**100**	**50,000,000**	**100**	**50,000,000**	**100**	**150,000,000**	**BIDANG PM**
				Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Kelurahan yang dilakukan pembinaan dan pengawasan	Jumlah kelurahan yang dilakukan pembinaan dan pengawasan dibagi Total Jumlah Kelurahan x 100%	%		100	50,000,000	100	50,000,000	100	50,000,000	100	150,000,000	
				Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Terlaksananya Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan		Dokumen		1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	3	150,000,000	
				PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	**Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat**	**Persentase LKK Aktif**	**Jumlah LKK Kelurahan yang Aktif dalam Kegiatan Skala Kota/ Jumlah LKK Kelurahan yang Ada x 100%**	**%**		**100**	**1,052,000,000**	**100**	**1,252,000,000**	**100**	**1,252,000,000**	**100**	**3,556,000,000**	**KABID PM**
				Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Dalam Daerah Kabupate/Kota	Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Dalam Daerah Kabupate/Kota	Persentase LKK yang Melaksanakan Kegiatan Ekonomi Produktif dan Pemberdayaan	Jumlah LKK yang Melaksanakan Kegiatan Ekonomi Produktif dan Pemberdayaan dibagi Jumlah LKK yang Ada x 100%	%		100	1,052,000,000	100	1,252,000,000	100	1,252,000,000	100	3,556,000,000	
				Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya		Lembaga		252	40,000,000	252	40,000,000	252	40,000,000	252	120,000,000	

				Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa / Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Terlaksananya Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa / Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa / Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat		Unit		42	30,000,000	42	30,000,000	42	30,000,000	126	90,000,000	
				Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Terlaksananya Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna		Laporan		1	40,000,000	1	40,000,000	1	40,000,000	3	120,000,000	
				Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Terlaksananya Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat		Laporan		1	40,000,000	1	40,000,000	1	40,000,000	3	120,000,000	
				Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Terlaksananya Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga		Dokumen		1	902,000,000	1	1,102,000,000	1	1,102,000,000	3	3,106,000,000	
		Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan				**Indeks Pemberdayaan Gender**		**Indeks**	**61.19**	**61, 29**		**61.39**		**61.49**		**61.49**		**KEPALA DPPPAKB**
			Meningkatnya Partisipasi Perempuan pada Lembaga Pemerintahan			**Persentase Perempuan Pada Lembaga Pemerintahan**	**Jumlah pekerja perempuan di lembaga pemerintahan) ; jumlah pekerja perempuan x 100**	**%**		**20**		**22**		**24**				**KEPALA DPPPAKB**
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, KABUPATEN/KOTA	**Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Prima Internal Perangkat Daerah**	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Penilaian APIP**	**Nilai**	**65.68**	**67**	**5,250,828,862**	**69**	**5,427,793,323**	**71**	**5,530,435,104**	**71**	**16,209,057,289**	**SEKRETARIS**
						Indeks Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah	**Indeks Kepuasan Pelayanan Internal Dengan Metode Survey**	**Nilai**		**85**		**90**		**95**		**95**		
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terpenuhinya Penyampaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Kinerja Perangkat daerah Tepat Waktu	Persentase Penyampaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan kinerja yang disusun tepat waktu Tahun Berkenaan dibagi jumlah perencanaan, penganggaran dan kinerja yang Disusun Tahun Berkenaan x 100%	%		100	17,500,000	100	17,500,000	100	17,500,000	100	52,500,000	
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		dokumen		2	2,500,000	2	2,500,000	2	2,500,000	6	7,500,000	
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		dokumen		1	2,500,000	1	2,500,000	1	2,500,000	3	7,500,000	
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		dokumen		1	2,500,000	1	2,500,000	1	2,500,000	3	7,500,000	
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		dokumen		1	2,500,000	1	2,500,000	1	2,500,000	3	7,500,000	

				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		dokumen		1	2,500,000	1	2,500,000	1	2,500,000	3	7,500,000	
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Laporan		4	2,500,000	4	2,500,000	4	2,500,000	12	7,500,000	
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Laporan		4	2,500,000	4	2,500,000	4	2,500,000	12	7,500,000	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Keuangan Perangkat Daerah Sesuai SAP	Persentase Tersusunnya Laporan Keuangan Perangkat Daerah Sesuai SAP	Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang Tersusun Sesuai SAP Tahun Berkenaan dibagi Jumlah Seluruh laporan Keuangan yang Disusun Tahun Berkenaan x 100%	%		100	4,004,703,253	100	4,104,570,834	100	4,206,935,104	100	12,316,209,191	
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		Orang/ bulan	35	35	3,994,703,253	35	4,094,570,834	35	4,196,935,104	35	12,286,209,191	
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		laporan	1	4	2,500,000	4	2,500,000	4	2,500,000	12	7,500,000	
				Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		Dokumen	1	1	2,500,000	1	2,500,000	1	2,500,000	3	7,500,000	
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Laporan	1	4	2,500,000	4	2,500,000	4	2,500,000	12	7,500,000	
				Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Dokumen	1	2	2,500,000	2	2,500,000	2	2,500,000	6	7,500,000	
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Menurunnya Pelanggaran Disiplin Pegawai Perangkat Daerah	Persentase Penurunan Tingkat pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah pelanggaran disiplin ASN tahun berkenaan dikurangi Jumlah pelanggaran disiplin ASN tahun lalu dibagi jumlah pelanggaran disiplin ASN tahun lalu x 100 %	%		20	95,125,609	10	106,000,000	9	106,000,000		307,125,609	
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan		Paket		1	75,125,609	1	76,000,000	1	76,000,000	3	227,125,609	
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		Orang		5	10,000,000	5	20,000,000	5	20,000,000	15	50,000,000	
				Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai		Dokumen		1	10,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000	3	30,000,000	

				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Tercantum dalam APBD Tahun Berkenaan dibagi Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Direncanakan dalam Renja Tahun Berkenaan x 100%	%		100	282,500,000	100	328,722,489	100	319,000,000	100	930,222,489	
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan		Paket		1	10,000,000	1	15,000,000	1	10,000,000	3	35,000,000	
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan		Paket		1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	3	150,000,000	
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		Paket		1	8,000,000	1	8,722,489	1	8,000,000	3	24,722,489	
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		Paket		2	40,000,000	2	45,000,000	2	40,000,000	6	125,000,000	
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		Paket		2	37,000,000	2	40,000,000	2	40,000,000	6	117,000,000	
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Laporan		1	117,500,000	1	150,000,000	1	151,000,000	3	418,500,000	
				Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Dokumen		1	10,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000	3	30,000,000	
				Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Dokumen		1	10,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000	3	30,000,000	
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Perangkat Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Perangkat Daerahh	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah yang Terealisasi Tahun Berkenaan (Unit0 dibagi Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah yang Direncanakan dalam Renja Tahun Berkenaan (Unit) x 100%	%		100	140,000,000	100	140,000,000	100	140,000,000	100	420,000,000	
				Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		Unit		10	30,000,000	10	30,000,000	10	30,000,000	30	90,000,000	
				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		Unit		1						1		
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		Unit		2	20,000,000	1	20,000,000	1	20,000,000	4	60,000,000	
				Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		Unit		1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	3	150,000,000	
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang Disediakan		Unit		1	20,000,000	1	20,000,000	1	20,000,000	3	60,000,000	
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang disediakan		Unit		1	20,000,000	1	20,000,000	1	20,000,000	3	60,000,000	

				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Sub Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Tercantum dalam APBD Tahun Berkenaan dibagi Jumlah Sub Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Direncanakan dalam Renja Tahun Berkenaan x 100%	%		100	445,000,000	100	455,000,000	100	455,000,000	100	1,355,000,000	
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Laporan		4	215,000,000	4	225,000,000	4	225,000,000	12	665,000,000	
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		Laporan		4	130,000,000	4	130,000,000	4	130,000,000	12	390,000,000	
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		Laporan		4	100,000,000	4	100,000,000	4	100,000,000	12	300,000,000	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik	Jumlah Barang Milik Perangkat Daerah yang Terpelihara dengan Baik Tahun Berkenaan (Unit) dibagi Jumlah Seluruh Barang Milik Perangkat Daerah yang Ada Tahun Berkenaan (Unit) x 100	Laporan		100	266,000,000	100	276,000,000	100	286,000,000	100	828,000,000	
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		Unit		1	52,000,000	1	52,000,000	1	52,000,000	1	156,000,000	
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		Unit		5	122,000,000	5	132,000,000	5	142,000,000	5	396,000,000	
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		Unit		20	20,000,000	20	20,000,000	20	20,000,000	20	60,000,000	
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		Unit		1	72,000,000	1	72,000,000	1	72,000,000	1	216,000,000	
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	TerlaksananyaPemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi		Unit		0		0		0		0		
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		Unit		0		0		0		0		
											8,737,328,862		**9,364,293,323**		**9,460,257,783**		**27,561,879,968**	